

BAB III

TRAGEDI *WORLD TRADE CENTER* (WTC) DAN KEBIJAKAN “*WAR ON TERRORISM*”

Pada bab III, penulis ingin memaparkan mengenai bagaimana alur terjadinya tragedi serangan *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 atau yang sering disebut sebagai peristiwa *Nine Eleven* (9/11) yang diduga dilakukan oleh teroris. Selain menjelaskan mengenai terjadinya tragedi WTC, dalam bab ini penulis juga menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan “*War on Terrorism*” yang diterapkan oleh George W. Bush yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden dalam menanggapi terjadinya peristiwa tersebut serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut baik dalam lingkup internasional maupun lingkup domestik.

A. Tragedi WTC (Peristiwa Serangan 11 September 2001)

11 September 2001 menjadi sejarah terburuk bagi Amerika Serikat, pada hari itu gedung *World Trade Center* (WTC) serta gedung *Pentagon* yang menjadi ikon serta pusat kegiatan di Amerika Serikat secara tiba-tiba runtuh karena adanya serangan teroris. Serangan tersebut berhasil menyebarkan ancaman serta ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan memakan korban hingga 3000 jiwa.⁶⁰

⁶⁰ Kusuma, Arnold Arswenda. (2015). Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Mengatasi Gerakan Terorisme Internasional di Afghanistan . *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1.

Peristiwa ini merupakan serangkaian dari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh pembajak pesawat dengan menabrakkan dua pesawat Boeing 767-223ER yang merupakan milik dari penerbangan Amerika Serikat yang bernama *American Airline* ke Gedung *World Trade Center* (WTC). Pesawat tersebut diduga membawa bahan bakar penuh sekitar 20 ribu galon sehingga ketika pesawat tersebut menabrak gedung WTC kemudian menimbulkan lubang serta ledakan besar di lantai 80.⁶¹

Gambar 3. 1 Serangan Teroris di Gedung kembar *World Trade Center* (WTC)



Sumber : <http://makassar.tribunnews.com/2015/01/30/pendeta-inggris-ungkap-israel-dalang-penyerangan-wtc-11-september> diakses 17 April 2017

Serangan tersebut dilakukan dalam dua kali tahapan dimana serangan pertama berhasil meruntuhkan gedung sisi sebelah kanan yang langsung menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia baik yang berada di

⁶¹ Nugraha, Fajar. (2015). *11 September 2001, Serangan di Tanah Amerika Serikat* diakses dari <http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/11/168453/11-september-2001-serangan-di-tanah-amerika-serikat> diakses pada 17 April 2017

pesawat maupun gedung tersebut serta beberapa orang lainnya terperangkap di dalam gedung. Pasca serangan pertama, kemudian disusul oleh adanya tabrakan kedua pada sisi gedung sebelah kiri.

Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan yang besar dan menimbulkan gedung lain serta jalan di bawah gedung WTC dipenuhi puing-puing bangunan. Kerusakan yang ditimbulkan dari adanya serangan tersebut sangatlah besar, gedung *World Trade Center* (WTC) yang menjadi ikon bagi Amerika Serikat dan merupakan gedung yang dianggap kokoh dan kuat seketika hancur ketika dua pesawat komersil yang dibajak oleh para teroris menghantam gedung tersebut. Selain gedung WTC, gedung *Pentagon* juga menjadi sasaran bagi para teroris.

Serangan terorisme yang diduga dilakukan oleh kelompok radikal *Al-Qaeda* kembali diluncurkan, dalam kurun waktu sekitar satu jam pesawat Boeing yang sama yaitu pesawat *American Airline* penerbangan 77 yang terbang dari Virginia menuju Los Angeles menabrak Gedung *Pentagon* sekitar pukul 09.37 waktu setempat. Serangan terorisme kedua diduga juga dilakukan oleh pelaku yang sama dengan serangan terhadap gedung WTC. Asumsi tersebut didasarkan pada pola serangan yang sama yaitu dengan cara menabrakkan pesawat ke arah gedung yang telah ditargetkan. Sama halnya dengan gedung WTC yang dibangun dengan kokoh pasca serangan tersebut gedung *Pentagon* juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Serangan yang dilakukan oleh para teroris

terhadap gedung *Pentagon* berhasil memporak-porandakan gedung tersebut serta menyebabkan korban meninggal dunia sekitar 184 orang.⁶²

Gambar 3. 2 Kerusakan Gedung *Pentagon* pasca peristiwa 9/11



Sumber : <https://news.detik.com/bbc-world/d-3462338/fbi-rilis-kembali-foto-serangan-911-di-pentagon> diakses pada tanggal 17 April 2017

Pasca terjadinya serangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemudian menetapkan bahwa pelaku utama atau otak dibalik terjadinya serangan tersebut yaitu kelompok radikal *Al-Qaeda*. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Amerika Serikat menuduh *Al-Qaeda* sebagai dalang utama dalam peristiwa tersebut karena *Al-Qaeda* diduga melakukan serangan sebagai bentuk balas dendam atas sikap Amerika Serikat yang

⁶² Detik News. (2017). *FBI rilis Kembali Foto Serangan 9/11 di Pentagon* diakses dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-3462338/fbi-rilis-kembali-foto-serangan-911-di-pentagon> diakses pada tanggal 17 April 2017

mendukung Israel, keterlibatan Amerika Serikat di Perang Teluk serta keterlibatan Amerika Serikat dalam militer di Timur Tengah.⁶³

Kelompok *Al-Qaeda* merupakan organisasi islam radikal dengan tujuan yang tidak hanya difokuskan pada kebijakan anti-barat di Afghanistan saja, akan tetapi mereka juga lebih memfokuskan pada kebijakan anti-barat yang bersifat global. *Al-Qaeda* memiliki tujuan untuk mengusir Amerika Serikat serta orang-orang yang dianggap “Kafir” dari Timur Tengah maupun negara-negara yang mayoritas muslim, selain itu mereka juga ingin menghancurkan seluruh pemerintahan Islam di dunia yang dianggap bersekutu dengan Amerika Serikat, serta mendirikan negara yang berbasis islam dengan menyatukan negara-negara muslim di dunia.⁶⁴

Karena *Al-Qaeda* merupakan organisasi islam radikal serta memiliki tujuan untuk menciptakan negara berbasis islam tersebut kemudian menimbulkan dugaan Amerika Serikat yang memandang keliru bahwa *Al-Qaeda* merupakan representasi dari masyarakat muslim di dunia. Hal tersebut kemudian menimbulkan stigma negatif didalam masyarakat internasional yang menganggap bahwa *Al-Qaeda* merupakan representasi dari islam sehingga stigma negatif mengenai islam merupakan teroris sangat melekat pada diri semua masyarakat yang menganut agama islam.

Tragedi 11 September 2001 merupakan titik balik bagi politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Dunia islam.⁶⁵ Politik luar negeri

⁶³ Kusuma, Arnold Arswenda, Loc.Cit

⁶⁴ Kusuma, Arnold Arswenda, *Ibid*

⁶⁵ Cipto, Bambang. (2011). *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Amerika Serikat menjadi sarana ampuh untuk melancarkan perang melawan terorisme dimana pada saat itu pemerintah Amerika Serikat mengkaitkan terorisme dengan kalangan islam radikal. Dalam rangka menanggulangi isu terorisme yang melanda Amerika Serikat, Presiden George W. Bush kemudian membentuk kebijakan “*War on Terrorism*” guna menanggapi adanya peristiwa 9/11 tersebut. Kebijakan yang dibentuk oleh George W. Bush diharapkan nantinya dapat memberikan rasa aman bagi warga negara Amerika Serikat serta untuk menjaga keamanan nasional negara.

B. Kebijakan “War on Terrorism”

Peristiwa serangan gedung kembar serta gedung *Pentagon* terjadi pada masa jabatan presiden George W. Bush dan merupakan presiden Amerika Serikat yang ke 43. Beliau memerintah sejak tahun 2001 hingga 2009 karena pada pemilu 2004, beliau memenangkan pemilu kembali dan menjabat hingga tahun 2009. Sejak George W. Bush menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, beliau dikenal dengan doktrin yang melekat pada dirinya atau yang biasa disebut sebagai “*Bush Doctrine*”. 4 elemen utama kebijakan beliau seperti pencegahan terjadinya perang, menentang adanya senjata pemusnah massal dan melawan terorisme, perubahan regim agar menjadi negara superpower, serta mempromosikan demokrasi sangat melekat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bush.⁶⁶

⁶⁶ Singh, Robert. (2006). *The Bush Doctrine and The War on Terrorism*. Oxon: Routledge.

Kebijakan yang paling terkenal dari sosok George W. Bush adalah kebijakan “*War on Terrorism*” atau yang sering dikenal juga dengan sebutan “*Global War on Terrorism*” dimana kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi adanya tragedi 9/11 tersebut.⁶⁷ Kebijakan “*War on Terrorism*” diumumkan oleh presiden George W. Bush dalam kongres tanggal 20 september 2001. Dalam pidatonya, George W. Bush mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi segala bentuk terorisme serta menyebutkan bahwa pelaku utama dalam serangan 9/11 adalah organisasi teroris *Al-Qaeda* dan menunjuk Osama bin Laden sebagai dalang utama dan yang bertanggungjawab atas tragedi 9/11.⁶⁸ Terbentuknya kebijakan “*War on Terrorism*” merupakan salah satu upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk memberantas isu terorisme dan menciptakan perdamaian di seluruh dunia.

Komitmen Amerika Serikat dalam memerangi terorisme baik yang berasal dari dalam maupun di luar negeri memang tidak setengah-setengah, hal tersebut dibuktikan dari adanya pembentukan strategi untuk melawan terorisme terutama ekstrimis yang mereka anggap sebagai cikal bakal dari adanya terorisme.⁶⁹ Sehingga dalam perumusan strategi untuk melawan terorisme global, pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan semua departemen yang ada dalam pemerintahannya. Hasil dari

⁶⁷ Editors, Biography.com. *George W. Bush Biography*. Retrieved April 06, 2016, from The Biography.com website: <http://www.biography.com/people/george-w-bush-9232768>

⁶⁸ Asilah, Amalia. (2015). Analisis Propaganda CNN (Cable News Network) terhadap masyarakat Amerika Serikat tentang Al Qaeda. *Ejournal*.

⁶⁹ Chairman of the Joint Chiefs of Staff, *National Military Strategic Plan For The War on Terrorism*, 2006, Washington, DC 20318, Department of Defense, hal. 3

adanya perumusan strategi pertahanan Amerika Serikat yaitu *National Military Strategic Plan for the War on Terrorism* (NMSP-WOT).

National Military Strategic Plan for the War on Terrorism (NMSP-WOT) merupakan rancangan khusus mengenai strategi militer nasional yang dibuat oleh departemen pertahanan Amerika Serikat dengan gabungan dari seluruh kepala staff dalam pemerintahan Bush untuk perang melawan terorisme. Dalam rencana strategi militer nasional tersebut, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa musuh utama dari *Global War on Terrorism* adalah adanya pergerakan transnasional organisasi ekstremis, jaringan-jaringannya, individu-individu, serta pendukungnya baik negara maupun non negara yang memiliki kesamaan memanfaatkan islam dan menggunakan terorisme untuk mencapai tujuan ideologisnya.⁷⁰ Dalam hal ini, ekstremis yang dimaksudkan oleh pemerintah Amerika Serikat salah satunya adalah *Al Qaeda Associated Movement* (AQAM).

Selain membentuk strategi keamanan untuk melindungi Amerika Serikat dari adanya ancaman terorisme, pemerintah Amerika Serikat juga membentuk serangkaian kebijakan “*War on Terrorism*” untuk menjaga keamanan nasional Amerika Serikat yaitu dengan membentuk *The USA Patriot Act 2001* dan *Homeland Security Act 2002*.

⁷⁰Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2006, Ibid hal. 13

1. The USA Patriot Act 2001

The USA Patriot Act of 2001 merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk oleh presiden George W. Bush guna menanggapi adanya serangan 9/11. Tujuan utama dari dibentuknya kebijakan *the USA Patriot Act* adalah untuk mencegah adanya ancaman baik yang berasal dari internal maupun eksternal terhadap Amerika Serikat. Pembentukan kebijakan yang dianggap terlalu terburu-buru membuat kebijakan tersebut menjadi salah satu kebijakan yang kontroversial.⁷¹

Draft *The USA Patriot Act* diperkenalkan oleh jaksa Agung kepada *The House of Representatives* dan *US senate* pada tanggal 19 September 2001 dan resmi dikeluarkan pada 26 Oktober 2001. Tindakan cepat tanggap yang dilakukan oleh George W. Bush dalam menanggapi serangan tersebut dengan membentuk kebijakan dalam upaya membuat Amerika Serikat lebih aman memang patut diberi penghargaan, namun pendekatan yang digunakan serta strategi yang direncanakan dianggap cacat.⁷²

Menurut Kam C. Wong, Kepala Departemen *Criminal justice* di Universitas Xavier pembentukan kebijakan *The USA Patriot Act* dianggap terlalu terburu-buru karena tidak melalui prosedur seperti biasa. Pemerintahan Bush mendorong para pembuat kebijakan agar segera mengesahkan kebijakan tersebut

⁷¹ Kashan, Sunya (2009) "*The USA Patriot Act : Impact on Freedoms and Civil Liberties,*" ESSAI:Vol. 7, Article 28.

⁷² Kashan, Sunya (2009), *Ibid*

demi kepentingan keamanan negara. *The USA Patriot Act* berupaya untuk meningkatkan keamanan domestik dengan membentuk kerjasama dalam upaya melawan terorisme, meningkatkan pengawasan serta memperkuat hukum pemerintahan pusat mengenai anti *money laundering*, memberikan sanksi kepada mereka yang mendukung serta membantu segala bentuk kegiatan kelompok teroris baik individu maupun kelompok. Peraturan mengenai keimigrasian juga diperketat seperti adanya pengawasan terhadap keluar masuknya pelamar visa, para pelajar asing yang diwajibkan untuk memberikan informasi secara mendetail kepada pihak imigrasi, memberikan wewenang kepada lembaga eksekutif untuk menahan imigran yang dianggap memihak atau dicurigai terlibat dalam aksi terorisme dalam jangka waktu yang lama bahkan tak terbatas.⁷³

Karena kebijakan *The USA Patriot Act* dianggap kontroversial akhirnya Goerge W. Bush kemudian memutuskan untuk membentuk kebijakan baru yang tetap harus mempertimbangkan *The USA Patriot Act* yaitu *Homeland Security Act*.

⁷³ Kashan, Sunya (2009), *Ibid*

2. Homeland Security Act 2002

Sama halnya dengan *the USA patriot Act* yang dibentuk pada tahun 2001, kebijakan *Homeland Security Act* juga merupakan serangkaian dari penerapan kebijakan *war on Terrorism*. *Homeland Security Act* atau undang-undang keamanan Negara tahun 2002 untuk pertama kalinya secara resmi diperkenalkan kepada publik Amerika Serikat pada tanggal 25 November 2002, dan didukung oleh 118 anggota kongres dan ditandatangani oleh Presiden George W. Bush.⁷⁴

Undang-undang ini dibentuk karena adanya kekhawatiran terhadap keamanan dalam negeri Amerika Serikat pasca adanya serangan teroris terhadap gedung *World Trade Center* yang menyebabkan hampir lebih dari 3000 orang meninggal dan adanya serangkaian pengiriman paket yang mencurigakan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat terhadap keamanan dalam negeri Amerika Serikat.

Setelah disahkannya kebijakan *Homeland Security Act*, kemudian dibentuklah departemen baru lengkap dengan jabatan menteri baru dalam kabinet Amerika Serikat, yaitu *United States Departement of Homeland Security* dan *Secretary of Homeland Security*.

⁷⁴ Ariyanto, Michael Yuli. (2015). *Islamophobia dan Implementasi Homeland Security Act dalam Kebijakan Imigrasi AS* diakses dari http://www.kompasiana.com/tentativestory/islamophobia-dan-implementasi-homeland-security-act-dalam-kebijakan-imigrasi-as_550e7605a33311bc2dba8076 diakses 17 April 2017

Tugas utama dari departemen tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kembali serangan terorisme di Amerika Serikat, mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari adanya serangan terorisme serta memulihkan kembali kondisi Amerika Serikat baik kondisi psikologis warga negaranya maupun kondisi Amerika Serikat itu sendiri sebagai negara *superpower*⁷⁵

Sama halnya dengan *The USA Patriot Act 2001*, *Homeland Security Act 2002* juga dianggap sebagai kebijakan yang kontroversional karena dalam penerapannya, kebijakan tersebut sama-sama memberikan diskriminasi terhadap minoritas muslim di Amerika Serikat serta mencengkram kebebasan individu serta membatasi gerak masyarakat muslim baik muslim yang berada di negara-negara mayoritas muslim maupun muslim yang berada di Amerika Serikat itu sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka.

Walaupun sebenarnya pembentukan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya serta melindungi keamanan nasional. Menurut Henry Kissinger yang merupakan mantan menteri luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa *National Interest* suatu negara tidak bisa ditawar-tawar lagi posisinya, kita bisa memahami bahwa *Homeland Security Act*

⁷⁵ The Senate and House of Representatives of the United States (2002). *Homeland Security Act of 2002*. United States of America: publik Law 107-296, 107th Congress.

tahun 2002 merupakan implementasi dari keinginan Amerika Serikat untuk melawan terorisme global.⁷⁶

C. Implementasi kebijakan “*War on Terrorism*”

Tujuan utama dari dibentuknya kebijakan “*War on Terrorism*” yaitu untuk memusnahkan segala macam bentuk terorisme serta menjaga keamanan domestik dari ancaman terorisme baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Sehingga penerapan kebijakan “*War on Terrorism*” ditargetkan pada negara-negara yang terkait dengan isu terorisme.

Kebijakan “*War on Terrorism*” yang dibentuk oleh George W. Bush tidak hanya diterapkan terhadap negara-negara yang dicurigai sebagai sumber munculnya terorisme tetapi juga diterapkan di negara yang membuat kebijakan tersebut.

Bentuk penerapan kebijakan “*War on Terrorism*” dibagi kedalam dua lingkup yaitu lingkup internasional dan lingkup domestik. Penerapan kebijakan “*War on Terrorism*” dalam lingkup internasional yaitu dengan melakukan invasi ke Afghanistan dan Irak. Invasi di Afghanistan dilakukan karena Afghanistan yang merupakan negara bagi lahirnya kelompok *Al-Qaeda* dianggap sebagai negara ikut terlibat serta melindungi *Al-Qaeda*. Sedangkan invasi yang dilakukan di Irak dilatarbelakangi oleh keinginan Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein serta Irak dianggap sebagai negara yang memiliki senjata pemusnah massal.

⁷⁶ Ariyanto, Michael Yuli. (2015). Loc.Cit

Sedangkan penerapan kebijakan dalam lingkup domestik yaitu dengan dibentuknya kebijakan *The USA Patriot Act 2001* dan *Homeland Security Act* pada tahun 2002.

1. Invasi Afghanistan dan Irak

Proyek melawan terorisme di Amerika Serikat dilakukan dalam bentuk invasi ke Afghanistan dimana Afghanistan merupakan negara yang melahirkan kelompok radikal *Al-Qaeda*. Presiden George W. Bush mengatakan bahwa *Al-Qaeda* yang berbasis di Afghanistan merupakan kelompok yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Klaim tersebut didukung oleh beberapa fakta yang memperkuat keterlibatan kelompok *Al-Qaeda* pada serangan teroris 11 September 2001 diantaranya adalah, Osama Bin Laden mengisyaratkan untuk berperang dengan Amerika Serikat, kemudian dari 19 orang pembajak yang telah diidentifikasi, 3 diantaranya merupakan kelompok *Al-Qaeda* dan satu orang diantaranya juga terlibat dalam serangan di kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania.⁷⁷

Pandangan dasar tersebut kemudian menjadi latar belakang tindakan invasi oleh Amerika Serikat di Afghanistan pada tanggal 07 Oktober 2001 yang dianggap menjadi tempat dimana kelompok teroris berkembang. Pemerintah Afghanistan dibawah

⁷⁷ Kusuma, Arnold Arswenda. (2015). Loc.Cit

kepemimpinan Mullah Mohammed Omar (rezim Taliban) telah diminta oleh Presiden George W. Bush untuk menyerahkan Osama Bin Laden akan tetapi pemerintah Afghanistan menolak sehingga kemudian mereka dianggap telah bersekutu dan melindungi kelompok teroris (*Al-Qaeda*).

Presiden George W. Bush menganggap bahwa penolakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari ketidakinginan pemerintah Afghanistan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam rangka pemberantasan terorisme Global. Hal tersebut yang kemudian memicu pemerintah Amerika Serikat melakukan invasi di Afghanistan dengan mengatasnamakan perang melawan Global Terorisme.

Invasi di Afghanistan dilaksanakan satu bulan setelah tragedi 9/11 yaitu pada tanggal 07 oktober 2001.⁷⁸ Serangan tersebut ditargetkan pada instalasi pertahanan udara Taliban, Kementerian pertahanan, pusat komando di bandara, lapangan udara, jaringan listrik serta fasilitas produksi energi lainnya. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk melumpuhkan rezim Taliban yang juga merupakan organisasi ekstremis serta untuk melumpuhkan Osama bin Laden. Jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2001 menjadikan Afghanistan mengalami instabilitas politik, ekonomi, serta keamanan.

⁷⁸ Kristanti, Elin Yunita. (2014, Oktober 07). *Liputan6*. Retrieved November 16, 2016, from Global Liputan 6: <http://global.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan>

Selain melakukan invasi ke Afghanistan, kebijakan “*War on Terrorism*” ini juga ditujukan ke Irak. Invasi di Irak merupakan salah satu bentuk strategi pertahanan Amerika Serikat karena Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan bagi keamanan dunia sehingga pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi di Irak.

Pada 28 Januari 2003, Presiden Bush menyatakan bahwa ancaman keamanan terbesar dunia terletak pada rezim Saddam Hussein karena mereka dicurigai memiliki senjata pemusnah massal (*World Mass Destructions*) dan Presiden Bush juga menyatakan bahwa Irak juga ikut terlibat membantu melindungi organisasi teroris *Al-Qaeda* serta diduga menyuplai senjata pemusnah massal kepada *Al-Qaeda*.⁷⁹

Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak bertujuan untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang berkuasa pada saat itu karena Saddam Hussein memimpin Irak dengan kediktatoran dan melakukan banyak kekerasan bahkan pembunuhan. Selain menyingkirkan kediktatoran Saddam Hussein, Amerika memiliki beberapa alasan lain dalam melakukan invasi di Irak, diantaranya yaitu terkait dengan peledakan WTC di New York. Presiden Bush menuduh bahwa Irak ikut terlibat dibalik

⁷⁹ Hasanawati, Siti. (2014). Kebijakan National Security Strategy 2002 tentang Terorisme di Irak pada Masa Periode George W. Bush tahun 2003-2009. 22.

jaringan *Al-Qaeda* serta dianggap sebagai pihak yang juga bertanggungjawab atas tragedi WTC dan *Pentagon*.⁸⁰

Bush menghabiskan masa kepresidenannya untuk melumpuhkan pasukan Irak, menangkap Saddam Hussein, serta menambah pasukan dan berusaha keras untuk mempertahankan pasukan Amerika Serikat di Irak.

Penerapan kebijakan "*War on Terrorism*" seperti adanya invasi ke Afghanistan dan Irak membuat masyarakat muslim yang ada di negara tersebut yang bahkan tidak mengerti mengenai permasalahan apa yang mereka hadapi harus ikut merasakan adanya dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut. Invasi yang dilakukan di Afghanistan menyebabkan banyak korban jiwa baik pasukan Amerika Serikat sendiri maupun masyarakat sipil yang ada di Afghanistan. Berbagai bentuk pelanggaran HAM dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ketika menerapkan kebijakan tersebut diantaranya yaitu menangkap dan menahan ribuan orang dan warga negara asing yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme.

Beberapa dampak juga ditimbulkan dari adanya invasi Amerika Serikat di Irak diantaranya yaitu banyak menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum di Irak seperti rumah sakit, infrastruktur, keamanan, selain itu korban yang meninggal pasca

⁸⁰ Hasanawati, Siti. *Ibid*

invasi sekitar 100 ribu orang dimana mayoritas masyarakat di Irak merupakan muslim.

Tidak hanya negara-negara yang berada di timur Tengah saja yang mengalami kendala baik pemerintahannya maupun masyarakat di negara tersebut, tetapi negara-negara yang mayoritas muslim juga mendapatkan pengaruh yang cukup berarti. Penerapan kebijakan *War on Terrorism* Amerika Serikat salah satunya yaitu membatasi arus masuk generasi muda Islam yang memiliki nama Arab dari negara-negara muslim maupun negara mayoritas muslim. Sejak terjadinya peristiwa tersebut, calon mahasiswa yang akan menuntut ilmu di negeri paman sam tersebut mengalami kesulitan akses ke Amerika Serikat sehingga mereka harus memilih untuk melanjutkan kuliah di negara Barat selain Amerika Serikat.⁸¹

Diskriminasi terhadap masyarakat muslim di seluruh dunia semakin meningkat, masyarakat-masyarakat yang mayoritas non Islam memandang Islam merupakan agama yang kejam dan identik dengan terorisme, sehingga banyak negara-negara yang menerapkan peraturan yang lebih ketat terutama dalam hal keimigrasian. Ketika ada masyarakat muslim yang ingin pergi ke suatu negara, mereka akan dicurigai sehingga ketika melakukan pemeriksaan di keimigrasian mereka akan melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap masyarakat muslim tersebut. Sehingga

⁸¹ Cipto, Bambang, (2011) Op.Cit hal 11

terkadang mereka mengalami berbagai kendala seperti kesulitan akses untuk memasuki negara-negara tertentu karena adanya kebijakan “*War on Terrorism*”.

2. Lingkup Domestik

Selain menerapkan kebijakan “*War on Terrorism*” dalam lingkup internasional, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan tersebut dalam lingkup domestik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya poster-poster yang terpampang di jalan raya yang menyuarakan untuk mengingat tragedy 9/11, serta adanya kalimat “*someone get binLADEN*”. hal ini dimaksudkan agar warga Amerika Serikat harus mengingat peristiwa serangan 9/11 dan bersama-sama melawan terrorisme global.⁸² Selain itu, George W. Bush juga merumuskan kebijakan *War on Terrorism* dalam lingkup domestik yaitu *the USA Patriot Act* pada tahun 2001 serta *Homeland Security Act* tahun 2002.

Bentuk penerapan kebijakan *the USA Patriot Act* dan *Homeland Security Act* diantaranya yaitu seperti memberikan sanksi kepada siapa saja yang mendukung serta membantu segala bentuk kegiatan kelompok teroris baik individu maupun kelompok. Peraturan mengenai keimigrasian juga diperketat seperti adanya pengawasan terhadap keluar masuknya pelamar visa, para pelajar

⁸² Croft, Stuart. (2006). *Culture, Crisis, and America's War on Terrorism*. New York: Cambridge University press. Hal. 47

asing yang diwajibkan untuk memberikan informasi secara mendetail kepada pihak imigrasi, memberikan wewenang kepada lembaga eksekutif untuk menahan imigran yang dianggap memihak atau dicurigai terlibat dalam aksi terorisme dalam jangka waktu yang lama bahkan tak terbatas. Selain itu pada 4 Desember 2001, pemerintah Amerika Serikat juga menutup lembaga-lembaga amal muslim seperti *the Holy Land Foundation for Relief and Development* (HLF), *Global Relief Foundation* (GRF), dan *Benevolence International Foundation* (BIF) karena organisasi-organisasi tersebut dicurigai menyalurkan dana kepada kelompok HAMAS di Palestina.⁸³

Penerapan kebijakan “*War on Terrorism*” dalam lingkup domestik lebih ditujukan kepada para masyarakat muslim baik yang ada di Amerika Serikat itu sendiri maupun yang akan ke Amerika Serikat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa pelaku utama dalam tragedi WTC merupakan kelompok muslim sehingga mereka menganggap bahwa secara umum masyarakat yang menganut agama muslim merupakan seorang teroris.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tragedi WTC atau yang sering dikenal sebagai peristiwa 9/11 menjadi *trigger* atau pemicu utama lahirnya kebijakan “*War on*

⁸³ Kartini, Indriana. (2004). *Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat. Ringkasan laporan penelitian Kelompok Dunia Islam 2004*, 103.

Terrorism” yang sangat kontroversial. Kebijakan yang awalnya dibentuk karena dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah Amerika Serikat untuk melawan segala macam bentuk terorisme, kemudian menjadi titik balik politik luar negeri Amerika Serikat terhadap dunia Islam mengingat target utama dalam kebijakan tersebut yaitu Islam.

Islam menjadi target utama dari penerapan kebijakan tersebut karena dilatarbelakangi oleh adanya dugaan dari Amerika Serikat yang menganggap bahwa *Al-Qaeda* yang digadang-gadang sebagai pelaku utama dalam serangan gedung WTC dan gedung *Pentagon* merupakan representasi dari masyarakat muslim di dunia sehingga stigma negatif mengenai islam adalah teroris sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat muslim di seluruh dunia. Penerapan kebijakan “*War on terrorism*” dilakukan dalam bentuk invasi Afghanistan dan Irak serta lingkup domestik yang kebijakannya cenderung ditujukan kepada masyarakat muslim.

Adanya invasi di Afghanistan dan Irak memberikan dampak yang cukup besar terhadap muslim di seluruh dunia, masyarakat muslim yang berada di Afghanistan dan Irak yang merupakan warga sipil juga ikut merasakan dampak dari adanya kebijakan tersebut.

Dengan terjadinya tragedi WTC dan dibentuknya kebijakan “*War on Terrorism*” yang kontra terhadap islam, masyarakat

muslim diseluruh dunia mengalami berbagai kendala dalam menjalankan kehidupan mereka. Penerapan kebijakan “*War on Terrorism*” tidak hanya berdampak bagi masyarakat muslim internasional akan tetapi juga berdampak bagi masyarakat muslim di Amerika Serikat. Dalam Bab 4, penulis akan memaparkan mengenai bagaimana dampak kebijakan “*War on Terrorism*” terhadap muslim Amerika Serikat serta bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi politik minoritas muslim di Amerika Serikat.